BAB II

PEMIMPIN AGAMA DAN OTORITAS PEMIMPIN

A. Makna Pemimpin Agama

Makna adalah pemahaman dan penjelasan dari suatu tindakan yang dilakukan oleh aktor. Aktor berperan penting dalam merumuskan suatu tindakan tertentu di lingkungan masyarakat. Tindakan ini bisa berupa tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh aktor tersebut. Adapun makna sebagai reaksi yang dipikirkan sekaligus direalisasikan.[1] Makna disini yaitu berupa makna atau arti tindakan aktor (individu) yang mana memiliki makna subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain serta terhadap tindakan itu pelakunya memiliki makna-makna subjektif tertentu. Hal demikian menekankan pada subjektivitas manusia seperti terhadap gejala-gejala yang tidak dapat diamati berupa perasaan individu, pikiran dan motif-motifnya.[2] Dalam hal ini terkait makna pemimpin agama yaitu makna bagi masyarakat maupun aktor tersebut dalam memandang sosok pemimpin agama.

Setiap orang dapat menjadi pemimpin agama. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan atau kelebihan pada satu bidang sehingga ia mampu memengaruhi orang lain untuk

---

[1] Wiwik Setiyani, "Harmonisasi Agama dan Budaya; Makna Tindakan Tlasih 87 di Sumbergirang Mojokerto Jawa Timur" (Disertasi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Keislaman pada Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2014), 25; James Boyd White, *The Edge of Meaning* (London: the University of Chicago, 2001), xiv.

[2] Wiwik Setiyani, "Harmonisasi Agama dan Budaya; Makna Tindakan Tlasih 87 di Sumbergirang Mojokerto Jawa Timur"..., 82; Rob Stones, "Teori-Teori Tindakan Sosial" dalam *Teori Sosial: dari Klasik sampai Postmodern*, ed. Bryan S. Turner (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.[3] Melihat dari pengertian pemimpin tersebut maka yang dimaksud pemimpin agama adalah orang yang memiliki kelebihan di bidang kegamaan dan mampu memengaruhi orang lain untuk melakukan kegiatan keagamaan secara bersama-sama demi mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa seseorang mampu menjadi pemimpin agama di suatu lingkungan masyarakat karena kelebihan-kelebihan yang dimilikinya.

Dalam Islam, pemimpin dikenal dengan sebutan *Imam*, yang berarti pemuka agama dan pemimpin spiritual yang diteladani dan dilaksanakan fatwanya. Selain itu, pemimpin disebut juga dengan istilah *amir* atau *ulil amir*, yaitu pemimpin yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur masyarakat.[4] Sedangkan menurut Ibnu Katsir, *ulil amri* diartikan sebagai pemerintah, ulama, cendekiawan, pemimpin militer atau tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi tumpuan bagi umat Islam dan menerima kepercayaan atau amanat dari anggota masyarakat. [5] Allah swt. berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 59:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ، فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ، ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا.

> Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[6]

---

[3] Veithzal Rivai, Bachtiar dan Boy Rafli Amar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 2.
[4] Ibid., 10.
[5] Ma'rufah, "Karakteristik Pemimpin dalam Al-Qur'an" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel, 2007), 42.
[6] al-Qur'an, 4:59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemimpin adalah pengakuan bahwa manusia merupakan *khalīfah fil arḍi* (pemimpin di muka bumi). Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

وَاِذْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓىِٕكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى اْلاَرْضِ خَلِيْفَةً، قَالُوْٓااَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَالاَتَعْلَمُوْنَ.

> Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?". Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".[7]

Ayat di atas menerangkan bahwa selain sebagai khalifah yang memelihara bumi, manusia juga memiliki kesempurnaan daripada makhluk-makhluk lain yang ada di muka bumi. Manusia dianugerahi akal, hati, perasaan, kecerdasan, jiwa, motivasi, dan spiritualitas. Melalui kesempurnaan tersebut maka manusia layak dikatakan sebagai pemimpin, minimal pemimpin untuk dirinya sendiri.[8] Di sini dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin agama pun memiliki potensi pikir (kecerdasan) dan potensi nurani (perasaan) yang dapat bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain, misalnya dengan suatu kemahiran di bidang agama maka seorang pemimpin agama dapat mengamalkan ilmunya kepada masyarakat. Hal ini berarti pemimpin agama dibutuhkan banyak orang.

Diantara bukti seorang pemimpin agama bermanfaat bagi banyak orang adalah ia memiliki peran pokok yang dapat dimainkannya:

---

[7] al-Qur'an, 2:30.

[8] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Leadership* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pelayan, yang berarti bahwa pemimpin merupakan pelayan bagi para pengikutnya. Karena itu, ia wajib memberikan kesejahteraan bagi pengikutnya (masyarakat).
2. Pemandu, yang berarti bahwa pemimpin merupakan pemandu yang memberikan arahan kepada para pengikutnya untuk menunjukkan jalan yang terbaik bagi mereka agar sampai pada tujuan yang diharapkan.[9]

Peran sebagai pemimpin agama yang dapat memberikan kesejahteraan rohani dan arahan yang baik merupakan dua peran yang saling berkaitan dimana hal ini dapat diterapkan ketika di dalam lingkungan masyarakat itu haus akan kerohanian maka pemimpin agama wajib berperan sebagai pelayan dan pemandu bagi masyarakat setempat. Hal ini terkait pula dengan memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya ilmu agama.

Berdasarkan perspektif sosiologis, peranan seorang pemimpin dapat diperoleh dengan jalan sebagai berikut:

a. Perolehan karena prestasi, misalnya banyak pengalaman pemimpin organisasi atau karena keahlian di suatu bidang yang menonjol hingga cocok jika dipilih untuk memimpin pekerjaan semacam itu.
b. Perolehan karena tradisi, misalnya pewarisan menurut keturunan, karena senioritas, dan berkaitan dengan posisi-posisi atau pertalian lain, seperti karena menjadi istri bupati maka otomatis menjadi ketua dharmawanita kabupaten.

[9] Ahmadi Sofyan, *Islam on Leadership* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2006), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Perolehan karena alasan-alasan tertentu atau berkaitan dengan balas jasa, misalnya karena berjasa membantu suatu kelompok, maka diangkat menjadi pemimpinnya.[10]

Di dalam lingkungan masyarakat tertentu, adakalanya seorang pemimpin agama juga dipilih karena beberapa alasan seperti karena pemimpin tersebut memiliki prestasi, karena tradisi turun-temurun di lingkungan setempat atau karena alasan tertentu lainnya. Untuk itu, seorang pemimpin agama yang telah ditunjuk masyarakat untuk berperan sebagai pimpinan mereka maka sudah selayaknya ia mampu menjalankan apa saja yang dipertanggungjawabkan kepadanya.

Adapun kepemimpinan Islam dalam konsep Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu mencakup cara-cara memimpin ataupun dipimpin demi terlaksananya ajaran Islam untuk menjamin kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat sebagai tujuannya. Ini menjelaskan bahwa selain manusia diamanahi Allah untuk menjadi khalifah di bumi (wakil Allah), ia juga diamanahi sebagai hamba yang terpanggil untuk mengabdikan dirinya di jalan Allah. Amanah tersebut diperoleh dari Allah lewat pemilihan yang dilakukan oleh manusia, kecuali para nabi dan rasul yang langsung dipilih oleh Allah. Konsep amanah ini menempati posisi sentral dalam kepemimpinan Islam.[11] Jadi, seorang pemimpin agama berperan penting dalam kehidupan masyarakat terkait amanah yang diberikan padanya dan setiap orang

---

[10] Imam Moedjiono, *Kepemimpinan dan Keorganisasian* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 18-19.

[11] Veithzal Rivai, Bachtiar dan Boy Rafli Amar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*..., 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menjadi pemimpin agama yang berkarakter dan berkualitas di suatu lingkungan masyarakat tertentu.

B. Karakteristik Pemimpin Agama

Kepemimpinan dalam interaksi manusiawi terkait langsung dengan masalah penyesuaian karakter atau kepribadian antara pemimpin dan orang-orang yang dipimpinnya atau sebaliknya. Penyesuaian tersebut dibutuhkan karena tidak ada dua manusia yang memiliki karakter atau kepribadian yang sama. Kepribadian seseorang pada dasarnya bersifat subjektif, yakni berupa konsep diri yang berpengaruh pada sikap dan tingkah lakunya. Sedangkan kepribadian yang dimaksud dalam kepemimpinan adalah sikap dan perilaku pemimpin yang terlihat oleh orang lain diluar dirinya. Dalam hal ini kepribadian bersifat objektif atau yang sebenarnya dari pemimpin itu. Sikap dan perilakunya akan menggambarkan tentang sifat-sifat khas, watak, keterampilan dan kemampuan yang dimiliki, minat, perhatian, kebiasaan dan lain-lain.[12] Karena itu, karakter seorang pemimpin agama juga dapat dinilai oleh orang lain atau pengikutnya dengan melihat sikap dan tingkah lakunya. Inilah yang dinamakan kepribadian yang bersifat objektif dari seorang pemimpin agama.

Seseorang dapat disebut sebagai pemimpin agama tentu ia memiliki karakter-karakter pada dirinya yang bisa membuat pengikutnya yakin terhadap kepemimpinannya. Karakter pemimpin agama tersebut tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya' ayat 73 yang berbunyi:

---

[12] Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَجَعَلْنٰهُمْ اَىِٕمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَآءَ الزَّكٰوةِ. وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ.

> Artinya: Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami-lah mereka selalu menyembah.[13]

Ayat ini menerangkan bahwa diantara karakter seorang pemimpin agama yaitu orang yang berbuat kebaikan dan beriman kepada Allah swt. Seorang pemimpin agama dalam masyarakat harus memiliki karakter seperti apa yang tertera di dalam Al-Qur'an tersebut. Hal ini dikarenakan masyarakat memerlukan bimbingan dari sosok pemimpin agama yang sesuai dengan ajaran Islam, misalnya ia dapat membimbing masyarakat lewat menjalankan shalat tepat waktu yakni dengan berjama'ah di Masjid atau Musholah.

Dalam memilih pemimpin, Islam menganjurkan perlunya memperhatikan kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Menurut Islam, seorang pemimpin agama juga harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

a. *Ṣiddiq* artinya jujur, benar, berintegritas tinggi, dan terjaga dari kesalahan.
b. *Faṭanah* artinya cerdas, memiliki intelektualitas tinggi dan profesional.
c. *Amanah* artinya dapat dipercaya, memiliki legitimasi.
d. *Tabligh* artinya menyampaikan kebenaran, tidak menyembunyikan apa yang wajib disampaikan, dan komunikatif.[14]

---

[13] al-Qur'an, 21:73.
[14] Veithzal Rivai, Bachtiar dan Boy Rafli Amar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*..., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika seorang pemimpin agama memiliki sifat-sifat seperti siddiq, fathonah, amanah, dan tabligh maka ia akan dapat mengarahkan orang-orang yang dipimpinnya ke jalan yang benar demi tercapai tujuan dan cita-cita bersama di lingkungan masyarakat tempat tinggalnya. Keempat sifat tersebut juga ada dalam diri pribadi Nabi Muhammad saw.

Nabi Muhammad saw. merupakan seorang pemimpin yang patut dijadikan teladan bagi setiap pemimpin Islam. Rasulullah adalah pemimpin yang berakhlak mulia, hidupnya sederhana, adil, dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Pada masa itu negara Islam menjadi maju, besar dan disegani serta umat Islam dapat hidup damai, aman, dan sejahtera. Akhlak di dalam bernegara yang dilakukan oleh Rasulullah misalnya bermusyawarah.[15] Nabi juga berperan mempersatukan suku-suku, melaksanakan perdamaian, memimpin dengan penuh cinta kasih, menyampaikan demokrasi melalui suatu majelis, mengkhotbahkan persamaan antara seluruh manusia serta kewajiban untuk saling tolong-menolong dan persaudaraan sedunia.[16] Terkait Rasulullah yang memiliki akhlak mulia tersebut, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4:

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ.

Artinya: Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.[17]

Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21 Allah swt. juga berfirman yang berbunyi:

---

[15] Veithzal Rivai, Bachtiar dan Boy Rafli Amar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*..., 69.
[16] Ahmadi Sofyan, *Islam on Leadership*..., 36-37.
[17] al-Qur'an, 68:4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُواالله وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا.

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat serta dia banyak menyebut Allah.[18]

Surat Al-Ahzab ayat 21 ini menerangkan bahwa pemimpin yang baik dalam Islam ialah pemimpin yang menjadikan Nabi Muhammad saw. sebagai teladan hidup karena dalam diri Rasulullah terkumpul berbagai macam kebaikan. Siti Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah, maka ia menjawab: "Akhlak Rasulullah ialah Al-Qur'an". Kesempurnaan dan kemuliaan ajaran dalam Al-Qur'an menunjukkan agungnya kepribadian Rasulullah.[19] Untuk itu, pemimpin agama perlu meneladani perilaku Rasulullah untuk memimpin masyarakatnya. Pemimpin agama juga perlu memiliki karakter seperti yang dijelaskan oleh ayat tersebut, yakni selalu mengharap rahmat dari Allah dan senantiasa menyebut nama-Nya.

Di samping penganjuran menjadi pemimpin layaknya Rasulullah, terdapat pula beberapa karakter yang harus dikembangkan oleh seorang pemimpin agama dalam menjalankan kepemimpinannya, diantaranya:

1. Berilmu, efektif, efisien, dan produktif dalam bertindak serta mampu menggunakan waktu dan memanfaatkan peluang.
2. Mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri.

---

[18] al-Qur'an, 33:21.

[19] Titik Nur Hayati, "Etika Kepemimpinan dalam Islam dan Kristen" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel, 2005), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Membangun kekuatan termasuk diri sendiri dan para pengikutnya.
4. Mau menerima kelebihan orang lain tanpa merasa malu.
5. Meletakkan perhatian pada beberapa bidang utama dan menyadari bahwa hanya dengan kerja keras akan memperoleh hasil yang baik.
6. Tawakal kepada Allah dengan meletakkan cita-cita yang tinggi.
7. Yakin pada diri sendiri bahwa hidup ini semata hanya untuk mengabdi kepada Allah.[20]

Agar dapat menjadi pemimpin yang baik, seorang pemimpin agama juga harus dapat memberi contoh atau teladan bagi mereka yang dipimpinnya. Ini diperlukan karena dengan memberikan teladan maka orang-orang dapat melihat sendiri dan percaya pada kebenaran ucapan-ucapan dan tingkah lakunya, sehingga mereka akan dapat dengan mudah digerakkan untuk mengikuti pemimpin agama tersebut.[21] Hal demikian sudah selayaknya dilakukan oleh sosok pemimpin agama yang mana ia memiliki karakter-karakter lebih daripada yang lainnya. Karena itu, suatu teladan dapat diberikan jika memang pemimpin agama itu memiliki akhlak yang baik.

Manusia merupakan makhluk mulia yang dipilih Allah sebagai pengelola alam. Karena itu, terdapat beberapa prinsip pokok dalam kepemimpinan Islam secara konseptual dan hubungan-hubungan antarindividu atau antarkelompok dalam konteks praktis, termasuk ini berkaitan dengan akhlak baik

[20] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Leadership*..., 169.
[21] Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, *Kepemimpinan dalam Masyarakat Modern* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang pemimpin agama dalam berinteraksi dengan masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

a. Saling menghormati dan memuliakan.
b. Menyebarkan kasih sayang.
c. Keadilan.
d. Persamaan di hadapan hukum.
e. Perlakuan yang sama dalam perbedaan sifat, karakter, dan latar belakang.
f. Kebebasan berpendapat.
g. Menepati janji.[22]

Dalam hal ini jelas bahwa setiap manusia adalah pemimpin. Mereka dapat menjadi pemimpin agama yang menanamkan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam untuk memimpin para pengikutnya secara bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian maka akan terwujud suasana harmonis, tentram dan sejahtera antaranggota masyarakat serta nantinya kehidupan keagamaan dapat pula terwujud dengan maksimal.

C. Tipologi Pemimpin

Seorang pemimpin dalam melakukan kepemimpinannya dapat digolongkan atas beberapa tipe. Dalam praktiknya, hal ini berkaitan dengan gaya kepemimpinannya. Berikut penjelasan dari tipe-tipe tersebut:

a. Tipe Otokratis

[22] Veithzal Rivai, Bachtiar dan Boy Rafli Amar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*..., 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang pemimpin yang otokratis adalah pemimpin yang menganggap organisasi sebagai milik pribadi. Ia juga mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap para pengikutnya sebagai alat semata-mata dan tidak boleh membantah perintah, tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat, tergantung kepada kekuasaan formalnya, bermusyawarah hanya untuk menyampaikan instruksi atau perintah, serta dalam tindakan penggerakannya sering menggunakan pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan bersifat menghukum atau bertindak sebagai diktator.

b. Tipe Militeristis

Seorang pemimpin yang militeristis adalah seorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat yaitu dalam menggerakkan para pengikutnya ia lebih sering menggunakan sistem perintah, senang bergantung kepada pangkat dan jabatannya, senang pada formalitas yang berlebih-lebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan, sukar menerima kritikan dari bawahannya, serta menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan.[23]

c. Tipe Paternalistis

Seorang pemimpin yang tergolong paternalistis adalah pemimpin yang memiliki ciri-ciri yaitu menganggap pengikutnya sebagai manusia yang belum dewasa atau masih membutuhkan bantuan dan perlindungan, bersikap terlalu melindungi, jarang memberikan kesempatan kepada pengikutnya untuk mengambil keputusan, bertindak sendiri, mengambil inisiatif, mengembangkan daya kreasi dan fantasinya, serta sering bersikap maha tahu. Akan tetapi,

[23] Veithzal Rivai, Bachtiar dan Boy Rafli Amar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*..., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemimpin paternalistis ini tidak ada sifat keras dan kejam terhadap mereka yang dipimpin, bahkan hampir dalam segala hal sikapnya baik dan ramah.[24]

d. Tipe *Laissez Faire* atau Bebas

Pemimpin yang bebas adalah pemimpin yang menunjukkan gaya dan perilaku yang pasif serta seringkali menghindar dari tanggung jawab. Dalam praktiknya, si pemimpin hanya menyerahkan dan menyediakan instrumen serta sumber-sumber yang diperlukan oleh pengikutnya untuk melaksanakan suatu pekerjaan demi tujuan yang ditetapkannya. Pemimpin tersebut memang berada diantara para pengikutnya, tetapi ia tidak memberikan motivasi, pengarahan dan petunjuk, serta segala pekerjaan diserahkan kepada pengikutnya atau anggotanya.[25] Di sini pemimpin hanya memiliki tugas representatif, yaitu untuk dunia luar ia adalah kepala bagian, tetapi pada umumnya ia tidak memberi suatu bentuk kepala bagian terhadap mereka yang dipimpinnya. Anggota juga diberikan kebebasan sepenuhnya sehingga menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi lambat, bahkan tidak berkeputusan.[26]

e. Tipe Karismatik

Pemimpin yang karismatik adalah pemimpin yang mempunyai daya tarik yang amat besar dan pada umumnya mempunyai pengikut yang jumlahnya sangat besar, meskipun para pengikutnya tidak dapat menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut pemimpin itu. Pemimpin semacam ini diberkahi dengan kekuatan gaib atau memiliki kemampuan luar biasa di luar

---

[24] Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, *Kepemimpinan dalam Masyarakat Modern*..., 32.
[25] Veithzal Rivai, Bachtiar dan Boy Rafli Amar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*..., 136.
[26] Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, *Kepemimpinan dalam Masyarakat Modern*..., 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan orang-orang biasa. Kepatuhan dan kesetiaan para pengikut timbul dari kepercayaan penuh terhadap kemampuan si pemimpin tersebut.

Pemimpin karismatik ini juga merupakan pemimpin yang dicintai, dihormati dan dikagumi, bukan semata karena benar atau tidaknya tindakan-tindakan yang dilakukan pemimpin tersebut, melainkan karena karisma yang dimilikinya. Pemimpin ini menampilkan citra yang revolusioner dan kemampuannya sendiri patut dicontoh para pengikutnya serta ia dapat membina dukungan untuk suatu perubahan, misalnya bukan karena perasaan belum matang bagi kemerdekaan yang membuat pemimpin itu dapat dipercaya, melainkan ia sendiri dapat membangkitkan kepercayaan bahwa kemerdekaan dapat diraih.[27]

f. Tipe Demokratis

Pemimpin yang demokratis adalah pemimpin yang bersifat kerakyatan atau persaudaraan, mengharap kerja sama dengan pengikutnya yang tidak dianggap sebagai alat, melainkan sebagai manusia. Dalam pelaksanaan tugas, pemimpin semacam ini mau menerima saran dan kritik dari para pengikutnya demi suksesnya pekerjaan bersama, bahkan selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi pengikutnya. Pemimpin ini juga menaruh kepercayaan yang cukup kepada pengikutnya untuk berusaha sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, seorang pemimpin demokratis

[27] Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, *Kepemimpinan dalam Masyarakat Modern*..., 32, 36-37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berusaha membangun semangat pada para pengikutnya serta mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pimpinan.[28]

Tipe-tipe pemimpin di atas juga dapat dimiliki oleh seorang pemimpin agama dalam masyarakat tertentu. Seorang pemimpin agama dapat tergolong dalam salah satu kategori dari tipe-tipe pemimpin tersebut, yang mana hal ini tidak lepas dari karakternya dalam memimpin para pengikutnya. Karena itu, jika seorang pemimpin agama ingin tercapai tujuannya maka seharusnya ia dapat berinteraksi, menjaga silaturahmi atau hubungan yang baik dengan pengikutnya. Dengan demikian antara pemimpin agama dan pengikutnya tidak ada sekat satu sama lain sehingga nantinya dapat bersama-sama menuju ke arah yang benar.

D. Teori Max Weber tentang Otoritas (wewenang) Pemimpin

Max Weber dikenal sebagai seorang ilmuwan sosial Jerman yang pertama kali menjelaskan tentang sifat-sifat dasar birokrasi. Ia mendapat penghargaan sebagai "bapak birokrasi". Dalam hal ini, gagasan Weber tersebut dapat dipahami dengan melihat konteks pengalaman hidupnya. Pada zaman Weber, kala itu terjadi peperangan di Eropa dan sering dimulai oleh para penguasa kerajaan. Ketika Weber masih anak-anak, Jerman baru menjadi sebuah negara bersatu. Adapun konflik politik tersebut sebagai tanggapan atas latar belakang cepatnya proses industrialisasi. Akibatnya, kaum petani dieksploitasi oleh pemilik pabrik hingga akhirnya mereka yang berputus asa memutuskan untuk berimigrasi ke kota. Melalui peristiwa ini pula terjadi peningkatan kasus bunuh diri karena

[28] Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, *Kepemimpinan dalam Masyarakat Modern...*, 38-40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat itu para pekerja industri baru kehilangan jaringan dukungan sosial mereka dan menjadi teralienasi dari masyarakat.

Pada masa perubahan besar di bidang sosial dan industri itu, Max Weber dibesarkan dalam keluarga Prusia tradisional dimana ayahnya adalah seorang penguasa absolut. Hal ini merupakan masa ketika seluruh kewenangan didasarkan pada hak turun-temurun secara genetik atau "kepemilikan" paternalistik. Karena itu, ketertarikan Weber cenderung pada pemahaman tentang sifat dasar kewenangan (otoritas) dan kepemimpinan.[29] Setelah melakukan studi briliannya tentang gereja Katolik, salah satu organisasi tertua dan paling sukses, Weber mengaplikasikan analisisnya pada semua jenis organisasi. Ia muncul dengan pendekatan baru yaitu sebuah landasan baru bagi kewenangan para pemimpin. Kewenangan ini dinamakan legal-rasional karena didasarkan pada suatu kontrak resmi antara pihak-pihak terkait. Selain itu, Weber juga mengamati beberapa pemimpin muncul tanpa kewenangan paternal atau legal-rasional, seperti Napoleon, entah darimana ia memainkan peran kepemimpinan besar (nasional dan internasional). Dalam hal ini, Weber kembali pada sebuah konsep yang dulu dibuatnya dalam analisis historis gereja Katolik, dan ia menamakannya sebagai sosok pemimpin dengan kewenangan karismatik. Karisma diambil dari kata Yunani kuno *kairismos* yang berarti sebuah pemberian Tuhan yang dihadiahkan kepada seseorang.[30] Melalui pengalaman hidup yang dialami Max Weber ini, membuktikan bahwa ia memperkenalkan tentang kewenangan karismatik,

---

[29] Marshall Sashkin dan Molly G. Sashkin, *Prinsip-prinsip Kepemimpinan* (Jakarta: Erlangga, 2011), 55.
[30] Ibid., 56-58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tradisional, dan legal-rasional dalam hal kepemimpinan, termasuk seorang pemimpin agama pasti juga memiliki salah satu dari kewenangan-kewenangan tersebut.

Adapun lewat konsep struktur birokrasi Weber, aspek-aspek perilaku yang dicerminkan dari birokrasi dapat dilihat dari penekanan Weber pada struktur yang ditimbulkan dari rasa tidak percaya kepada kesanggupan dan kemampuan manusia untuk menciptakan rasionalitas tertentu, memperoleh informasi yang baik, dan membuat keputusan yang objektif. Karena itu, perilaku yang nampak adalah bahwa seseorang membutuhkan bantuan untuk sampai pada pertimbangan-pertimbangan yang baik. Sruktur adalah jawabannya. Dengan cara mengatur tata hubungan kerja di dalam suatu organisasi, dengan spesialisasi prosedur dan aturan-aturan, maka keputusan akan dapat dibuat secara konsisten dan sistematis. Suatu unsur yang mengendalikan organisasi dan yang meyakinkan bahwa suatu prosedur dipatuhi adalah otoritas dan rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh para pemimpin.[31] Dalam hal ini Weber sangat tertarik tentang bagaimana para pemimpin memperoleh otoritas mereka.[32] Di sini dapat disimpulkan bahwa Weber membuat konsep struktur birokrasi untuk memperkenalkan tentang tata cara mengatur suatu hubungan sosial dalam bermasyarakat, termasuk terkait antara pemimpin dan yang dipimpin.

Seorang pemimpin agama tidak lepas dari adanya kekuasaan dan wewenang. Menurut Max Weber, kekuasaan itu sebagai suatu kemungkinan yang

---

[31] Otoritas merupakan unsur kekuasaan yang berhubungan erat dengan hak yang sah sesuai dengan status yang ada.

[32] Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi; Konsep Dasar dan Aplikasinya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat seorang aktor di dalam suatu hubungan sosial akan mampu untuk mewujudkan gagasan-gagasannya sekalipun ditentang oleh orang lain. Konsepsi "dominasi" ini hanya mengacu kepada kasus-kasus pemaksaan kekuasaan dimana seorang pelaku menuruti suatu perintah spesifik yang dikeluarkan oleh orang lain.[33] Penerimaan dominasi bisa diperoleh karena motif yang berlainan, misalnya karena keuntungan atau kepentingan pribadi. Namun unsur utamanya adalah kepercayaan dari pihak pengikut atas keabsahan kedudukan mereka sebagai seorang pengikut.[34] Ini menunjukkan bahwa kekuasaan seorang pemimpin dapat diterima oleh pengikutnya dikarenakan adanya keabsahan kedudukan mereka sebagai pengikut.

Kekuasaan seorang pemimpin sumbernya bisa datang dari dirinya yang memiliki kewibawaan, pandai bergaul dan berkomunikasi atau memiliki kemahiran *human relation* yang baik.[35] Dalam hal ini, kekuasaan juga digambarkan sebagai sebuah proses dimana satu pihak memengaruhi pihak lain sedemikian rupa. Pihak-pihak ini merupakan perorangan atau sekumpulan orang. Jika kekuasaan diakui oleh pihak-pihak tersebut maka terjadilah wewenang.[36] Terkait konsep "pengaruh" atau tindakan memengaruhi, artinya lebih mengacu pada proses atau aktivitas. Untuk memperoleh kekuasaan, seseorang harus menempatkan dirinya untuk menjadi kekuatan yang mampu mengubah cara pandang, kesadaran, dan tingkah laku orang lain. Jika ia dapat memengaruhi

---

[33] Weber menggunakan istilah dominasi karena kata ini dianggap memiliki makna yang lebih luas daripada otoritas.
[34] Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern; Suatu Analisis terhadap Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*, terj. Soeheba Kramadibrata (Jakarta: UI Press, 1986), 192.
[35] Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Bandung: Rajawali Pers, 1992), 140.
[36] Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain, maka akan mudah membuat orang lain tersebut melakukan sesuatu sesuai apa yang diharapkannya. Di sini pengaruhnya telah membuat orang lain melakukan sesuatu dimana "pengaruh" berkaitan dengan hubungan dirinya dengan orang lain. Pengaruh itu dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya pengetahuan, doktrin, dan kata-kata yang memiliki kekuatan untuk masuk ke dalam pikiran orang lain.[37]

Selanjutnya, Max Weber mengutarakan bahwa wewenang (otoritas) adalah kekuasaan yang sah.[38] Wewenang juga berarti kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Wewenang atau dalam istilah umum disebut sebagai *authority* atau *legalized power*, dimaksudkan suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijakan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Di sini seseorang yang memiliki wewenang bertindak sebagai orang yang memimpin atau membimbing orang banyak.[39] Penggunaan wewenang (otoritas) tergantung pada kerelaan para pengikut untuk patuh pada perintah orang yang memiliki otoritas tersebut. Tingkat kerelaan pun tergantung pada situasi yang berbeda-beda.[40]

---

[37] Nurani Soyomukti, *Pengantar Sosiologi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 409.
[38] Abdulsyani, *Sosiologi; Skematika, Teori dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 145.
[39] Syarif Moeis, "Struktur Sosial; Kekuasaan, Wewenang, dan Kepemimpinan", http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/195903051989011-SYARIF_MOEIS/BAHAN_KULIAH__3.pdf (Selasa, 10 Maret 2015, 20.18)
[40] Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994), 227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perihal pemimpin agama yang juga memiliki kewenangan, seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa Max Weber telah membuat tipe-tipe wewenang (otoritas). Diantara tipe-tipe tersebut adalah wewenang karismatik, wewenang tradisional, dan wewenang rasional. Adapun masing-masing tipe wewenang dirumuskan sehubungan dengan motivasi yang mendorong orang untuk taat dan dasar yang dipakai oleh pemimpin untuk menuntut ketaatan itu.

a. Wewenang Karismatik

Wewenang karismatik didasarkan atas suatu kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang, dimana kemampuan ini melekat pada orang tersebut karena anugerah Tuhan atau diyakini sebagai pembawaan seseorang sejak lahir. Orang-orang di sekitarnya mengakui adanya kemampuan itu atas dasar kepercayaan dan pemujaan karena mereka menganggap bahwa sumber kemampuan tadi merupakan sesuatu yang berada di atas kekuasaan dan kemampuan manusia umumnya, misalnya nabi, para rasul, penguasa-penguasa terkemuka dalam sejarah dan lain-lain.[41] Tokoh kharisma yang bersangkutan biasanya memberikan bukti dari keasliannya dengan melakukan hal-hal yang ajaib atau dengan mengeluarkan wahyu-wahyu yang bersifat ketuhanan. Tanda-tanda berlakunya otoritas atau wewenang kharismatik ini adalah para pengikut mengakui keaslian otoritas itu dan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut. Dalam wewenang kharismatik tidak didasarkan atas pemilihan yang bersandar pada hak-hak istimewa karena keterkaitan pribadi, tidak didasarkan atas pemilikan kemampuan-kemampuan teknis, tidak ada hierarki bawahan

[41] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang pasti, tidak ada karier seperti yang ada dalam organisasi birokrasi, tidak memiliki sarana bantuan ekonomi yang terorganisasi sistematis, penghasilan diperoleh dari berbagai sumbangan atau rampasan dan tidak diorganisasi di sekitar prinsip-prinsip hukum yang pasti. Akan tetapi, pemimpin kharisma memiliki banyak teman karib yang ikut memiliki bersama kharisma itu maupun mereka yang juga memiliki kharisma.[42]

Menurut Weber, istilah "karisma" menjadi ciri atau bakat seseorang yang mana ia dikhususkan dan dipisahkan dari orang-orang biasa. Ia dianggap memiliki kebijaksanaan atau kekuatan yang unggul, adikodrati, adimanusiawi, setidaknya luar biasa. Ciri lain wewenang ini ialah bahwa para pengikut mengabdikan diri kepada pemimpin karena merasa diri dipanggil untuk itu.[43] Weber mengatakan pula bahwa kharisma merupakan fenomena khusus yang tidak rasional. Hal ini karena landasan dari wewenang kharisma adalah pengakuan atas keotentikan dari yang dianggap sebagai sang pemimpin.[44]

Istilah "karisma" digunakan dalam pengertian yang luas untuk menunjuk pada daya tarik pribadi yang dimiliki pemimpin. Dalam penggunaan Weber, hal ini meliputi karakteristik-karakteristik pribadi yang memberikan inspirasi pada mereka yang akan menjadi pengikutnya. Istilah ini juga digunakan Weber dalam menggambarkan pemimpin-pemimpin agama yang

---

[42] Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern; Suatu Analisis terhadap Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*..., 198.
[43] K.J. Veeger, *Realitas Sosial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), 182.
[44] Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern; Suatu Analisis terhadap Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*..., 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkarismatik dimana dasar kepemimpinan mereka adalah kepercayaan bahwa mereka memiliki suatu hubungan khusus dengan yang ilahi.[45]

Dasar wewenang karismatik bersumber pada diri pribadi individu yang bersangkutan. Wewenang ini dapat berwujud suatu kewenangan yang dilakukan terhadap segolongan orang atau masyarakat. Karisma semakin meningkat sesuai dengan kesanggupan individu yang bersangkutan dalam membuktikan manfaatnya bagi masyarakat. Karena itu, keberadaannya akan tetap ada selama masyarakat banyak merasakan manfaatnya.[46]

b. Wewenang Tradisional

Wewenang tradisional mengambil keabsahannya atas dasar tradisi atau adat istiadat. Orang menjadi pemimpin bukan karena bakatnya, melainkan karena sudah diatur demikian di masa lampau, misalnya anak mewarisi tahta ayahnya.[47] Hal ini menunjukkan bahwa wewenang tradisional berasal dari faktor keturunan atau garis keluarga atau kesukuan. Dalam artian wewenang ini lebih didasarkan kepada hubungan-hubungan yang bersifat personal atau pribadi dan kesetiaan pribadi seseorang kepada pemimpin yang terdahulu. Dalam wewenang tradisional, si pemegang kekuasaan adalah mereka yang dianggap mengetahui tradisi yang disucikan, sehingga di sini ikatan-ikatan tradisional memegang peranan utama.[48]

Wewenang atau otoritas ini berlandaskan kepercayaan kepada kesucian peraturan yang sudah berabad-abad lamanya dan kekuasaan-kekuasaannya. Di

[45] Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*..., 229.
[46] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*..., 244.
[47] K.J. Veeger, *Realitas Sosial*..., 183.
[48] Hotman M. Siahaan, *Pengantar ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi* (Jakarta: Erlangga, 1986), 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunitas pedusunan kecil, otoritas dipegang oleh mereka yang sudah tua di desa itu karena orang paling tua yang dianggap paling meresapi kearifan tradisional dan memenuhi syarat kewibawaan untuk memegang otoritas atau wewenang tersebut.[49] Dalam wewenang tradisional tugas-tugas para anggota ditentukan secara majemuk, akan tetapi hak-hak istimewa dan kewajiban bisa saja disesuaikan berdasar keinginan si penguasa. Hal ini terjadi karena penempatan pejabat yang dilakukan atas dasar pertalian-pertalian pribadi.[50]

Weber membedakan tiga otoritas atau wewenang tradisional yang meliputi gerontokrasi, patriarkhalisme dan patrimonialisme. Gerontokrasi yaitu wewenang yang berada pada tangan orang-orang tua dalam suatu kelompok. Patriarkhalisme adalah jenis wewenang yang kekuasaannya berada dalam tangan suatu satuan kekerabatan (rumah tangga) yang dipegang oleh seorang individu tertentu dan memiliki otoritas warisan,[51] misalnya di dalam rumah tangga seorang kepala keluarga memiliki otoritas yang diturun-temurunkan dari generasi ke generasi menurut aturan-aturan pewarisan tertentu.[52] Sedangkan patrimonialisme adalah jenis wewenang yang mengharuskan seorang pemimpin bekerjasama dengan kerabat-kerabatnya atau orang-orang terdekat yang memiliki loyalitas pribadi kepadanya.[53] Dalam sebuah kasus yaitu patrimonialisme yang berakar pada administrasi rumah tangga penguasa, ini ditandai dengan campur aduknya kehidupan istana dan fungsi-fungsi

---

[49] Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern; Suatu Analisis terhadap Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*..., 192.
[50] Ibid., 193.
[51] Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*..., 228.
[52] Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern; Suatu Analisis terhadap Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*..., 193.
[53] Hotman M. Siahaan, *Pengantar ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*..., 202

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan. Pejabat-pejabatnya diambil dari para pendamping dan para pelayan si penguasa. Jika patrimonialisme dilakukan di wilayah yang lebih luas maka dibutuhkan landasan yang lebih luas untuk mengambil pembantu-pembantu dalam pemerintahan. Terkait hal ini, akibatnya muncul kecenderungan ke arah desentralisasi administrasi,[54] yang mana menjadi sebab dari ketegangan atau pertentangan antara penguasa dan pejabat patrimonial atau orang-orang terkemuka.[55] Ini menunjukkan bahwa penguasa patrimonial tidak dapat mengendalikan kepemimpinannya secara langsung atau melalui anggota-anggota keluarganya sendiri.[56]

Adapun ciri khas dari wewenang-wewenang tersebut adalah adanya sistem norma yang dianggap keramat sehingga pelanggaran atasnya akan menyebabkan bencana (bersifat gaib maupun religius). Selain itu, dalam merumuskan keputusan-keputusannya, si pemegang kekuasaan melakukannya atas dasar pertimbangan pribadinya, bukan pertimbangan fungsinya.[57]

c. Wewenang Legal-Rasional

Wewenang rasional disebut juga sebagai wewenang legal, yaitu wewenang yang didasarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat, misalnya pemimpin organisasi modern, ketua RT/RW yang dipilih secara langsung dengan musyawarah warga RT/RW. Mereka memperoleh otoritas tertinggi dari hukum masyarakat. Wewenang rasional dibangun atas dasar legitimasi (keabsahan) yang merupakan hak bagi pihak yang berkuasa.

[54] Desentralisasi ialah penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahannya.
[55] Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern; Suatu Analisis terhadap Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*..., 193.
[56] Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*..., 229.
[57] Hotman M. Siahaan, *Pengantar ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*..., 202.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keabsahan si pemegang kekuasaan itu untuk memberikan perintah berdasarkan peraturan yang telah disepakati bersama, membuat peraturan dan menjalankannya berdasar pada konstitusi yang ditafsirkan secara resmi. Perintah-perintah yang diberikan juga berdasarkan norma-norma yang impersonal (tidak bersifat pribadi). Di sini pemegang kekuasaan dalam memberi perintah tidak menggunakan kekuasaan itu sebagai hak pribadinya, melainkan sebagai suatu institusi impersonal. Institusi ini dibentuk oleh orang-orang atas dasar hukum untuk mengatur kehidupan mereka.[58]

Seorang yang memegang otoritas atau wewenang rasional, ia melakukan tugasnya dengan kebijakan norma-norma yang telah tertanam dalam konteks rasionalitas yang memiliki maksud atau rasionalitas-nilai. Mereka yang tunduk pada otoritas ini mematuhi atasannya bukan karena menerima norma-norma yang bersifat pribadi yang mendefinisikan otoritas itu. Dalam hal ini mereka yang tunduk pada otoritas hukum tidak memiliki kesetiaan yang bersifat pribadi kepada yang memerintahnya dan mereka mematuhi perintah atasannya hanya dalam batas-batas tertentu, misalnya kegiatan-kegiatan staf administrasi dijalankan secara teratur dan merupakan kedinasan resmi yang jelas batas-batasnya. Bidang-bidang wewenang para pejabat dibatasi dengan jelas dan tingkat-tingkat otoritas ditentukan batasnya dengan jelas dalam bentuk hierarki kantor. Aturan-aturan tentang perilaku para staf, otoritas dan tanggung jawabnya dicatat dalam bentuk tertulis. Jadi, di sini

[58] Hotman M. Siahaan, *Pengantar ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*..., 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kondisi apapun kantor tidak bisa dimiliki oleh yang berwenang di kantor tersebut dikarenakan adanya otoritas hukum.[59]

Ketiga tipe wewenang di atas dapat dijumpai di dalam masyarakat, meskipun hanya salah satu tipe saja yang menonjol. Dalam masyarakat yang hidupnya tenang dan stabil, wewenang tradisional cenderung terdepan. Namun dengan meluasnya sistem demokrasi, wewenang tradisional yang diwujudkan dengan kekuasaan turun-temurun nampak semakin berkurang. Adapun pada masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan cepat, mendalam dan meluas, wewenang kharismatik tampil terdepan dan tradisi tidak mendapat penghargaan dari masyarakat. Karena itu, golongan masyarakat dipimpin dengan sukarela oleh pemimpin yang cakap. Dalam hal ini, Max Weber berpendapat bahwa ada kecenderungan dari wewenang kharismatik (yang berkurang kekuatannya bila keadaan masyarakat berubah) untuk dijadikan kekuasaan tetap, yakni dengan mengabadikan kepentingan dan cita-cita para pengikut pemimpin kharismatik ke dalam kehidupan bersama kelompok dan mempererat hubungan satu dengan lainnya. Sedangkan pada masyarakat modern, masyarakat umumnya rasional dan menghendaki suatu landasan hukum yang kuat pada wewenang yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam hal ini wewenang rasional atau legal tampil terdepan.[60]

Melalui penjelasan di atas diketahui bahwa tipe-tipe wewenang tersebut dapat berubah atau hilang seiring dengan kemajuan ataupun perkembangan masyarakat saat itu. Begitu pula dengan si pemegang wewenang, jika ia tidak

---

[59] Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern; Suatu Analisis terhadap Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*..., 194.
[60] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*..., 246-247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat mengikuti perkembangan masyarakat maka kekuatan wewenang yang dimilikinya akan berkurang atau bahkan hilang. Hal demikian dapat berlaku pada seorang pemimpin agama di suatu lingkungan masyarakat yang mana bila ia tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat saat itu maka kekuatan wewenangnya tidak akan berpengaruh pada kepemimpinannya. Selain itu, wewenang dalam hal ini dapat dimiliki oleh seorang pemimpin apabila pemimpin tersebut memang memiliki sebuah kekuasaan.

Menyangkut hal itu, wewenang sangat erat hubungannya dengan kekuasaan. Dengan wewenang berarti seorang pemimpin memiliki hak untuk melakukan dan menetapkan sesuatu. Jadi, wewenang menekankan pada unsur hak, bukan pada kekuasaannya, meskipun kekuasaan dan wewenang tidak dapat dipisahkan. Secara sosiologis wewenang merupakan suatu kekuatan yang sah untuk menjalankan kekuasaan. Ini berarti bahwa kekuasaan baru dapat diterima oleh masyarakat jika dilengkapi oleh adanya wewenang yang sah baik berdasarkan hukum formal maupun berdasarkan norma-norma sosial dan adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.[61] Hal demikian juga akan dialami oleh pemimpin agama, bilamana kepemimpinannya ingin diterima oleh masyarakat maka ia harus memiliki kekuasaan dan wewenang tersebut dikarenakan adanya keterkaitan diantara keduanya.

[61] Abdulsyani, *Sosiologi; Skematika, Teori dan Terapan*..., 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id